



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 5 Nomor 1 Tahun 2025 Page 4050-4064

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Surabaya dalam Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

Julia Azizah Marshalena^{1✉}, Sri Wibawani²

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Email: juliaazizahmarshalena@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) dalam mengawasi organisasi masyarakat (ormas) di Surabaya. Evaluasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa ormas beroperasi dalam kerangka hukum dan memberikan kontribusi positif terhadap stabilitas sosial dan pembangunan masyarakat. Penelitian ini menyoroti pentingnya peran Bakesbangpol dalam memediasi antara pemerintah dan organisasi masyarakat, sehingga meningkatkan partisipasi publik dalam proses pembangunan dan mengatasi tantangan terkait kepatuhan terhadap peraturan. Untuk mencapai tujuan penelitian, metodologi penelitian kualitatif digunakan, yang meliputi pengumpulan data melalui wawancara, survei, dan observasi langsung. Peneliti mengumpulkan laporan dari berbagai ormas, melakukan wawancara dengan para pemimpin mereka, dan membagikan kuesioner kepada peserta untuk menilai kepuasan mereka dan dampak program. Triangulasi sumber data, termasuk observasi lapangan langsung, memungkinkan pemahaman yang komprehensif tentang efektivitas program dan tantangan yang dihadapi oleh organisasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Bakesbangpol telah membuat langkah-langkah signifikan dalam mengawasi ormas, tantangan tetap ada dalam memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan meningkatkan efektivitas program. Temuan penelitian ini mengungkap bahwa beberapa ormas masih kesulitan memahami ketentuan hukum, yang dapat berujung pada konflik dengan pemerintah. Selain itu, penelitian ini menunjukkan bahwa upaya Bakesbangpol dalam memfasilitasi dialog dan memberikan dukungan kepada ormas sangat penting untuk mendorong terciptanya lingkungan yang kolaboratif. Secara keseluruhan, evaluasi ini menggarisbawahi perlunya pemantauan berkelanjutan dan inisiatif peningkatan kapasitas untuk memperkuat peran ormas dalam pengembangan masyarakat dan kerukunan sosial.

Kata Kunci: *Organisasi, Masyarakat, Politik*

Abstract

The purpose of this study is to evaluate the performance of the Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) in overseeing community organizations (ormas) in Surabaya. This evaluation aims to ensure that ormas operate within the legal framework and contribute positively to social stability and community development. The study highlights the importance of Bakesbangpol's role in mediating between the government and community organizations, thereby enhancing public participation in development processes and addressing challenges related to compliance with regulations. To achieve the study's objectives, a qualitative research methodology was employed, which included data collection through interviews, surveys, and direct observations. The researcher gathered reports from various ormas, conducted interviews with their leaders, and distributed questionnaires to participants to assess their satisfaction and the impact of the programs. The triangulation of data sources, including direct field observations, allowed for a comprehensive understanding of the effectiveness of the programs and the challenges faced by the organizations. The results of the study indicate that while Bakesbangpol has made significant strides in overseeing ormas, challenges remain in ensuring compliance with regulations and enhancing the effectiveness of programs. The findings reveal that some ormas struggle with awareness of legal requirements, which can lead to conflicts with government authorities. Additionally, the study suggests that Bakesbangpol's efforts in facilitating dialogue and providing support to ormas are crucial for fostering a collaborative environment. Overall, the evaluation underscores the need for ongoing monitoring and capacity-building initiatives to strengthen the role of ormas in community development and social harmony.

Keywords: *Organization, Civil, Political*

PENDAHULUAN

Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Surabaya memiliki peranan yang sangat penting dalam menjaga stabilitas sosial dan politik di kota ini. Sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam pengawasan organisasi kemasyarakatan, Bakesbangpol berfungsi untuk memastikan bahwa semua organisasi yang ada di Surabaya beroperasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Untuk menjalankan fungsinya, Bakesbangpol mengacu pada berbagai regulasi yang ada, termasuk Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Undang-undang ini memberikan landasan hukum bagi pemerintah daerah untuk melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap organisasi kemasyarakatan. Dengan adanya regulasi ini, Bakesbangpol diharapkan dapat berfungsi sebagai mediator antara pemerintah dan masyarakat, sehingga setiap organisasi dapat beroperasi dalam koridor hukum yang telah ditetapkan.

Bakesbangpol juga berperan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Melalui pengawasan yang baik, diharapkan organisasi-organisasi kemasyarakatan dapat berfungsi sebagai mitra strategis pemerintah dalam menyampaikan aspirasi masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan sangat penting, karena dapat meningkatkan kualitas kebijakan yang diambil dan memupuk rasa memiliki terhadap hasil pembangunan.

Namun, tantangan yang dihadapi Bakesbangpol tidak sedikit. Salah satunya adalah kurangnya kesadaran dari beberapa organisasi kemasyarakatan mengenai pentingnya kepatuhan terhadap regulasi yang ada. Beberapa organisasi mungkin merasa bahwa mereka tidak perlu mengikuti aturan yang ditetapkan, yang dapat menyebabkan potensi konflik dengan pemerintah. Oleh karena itu, sosialisasi dan edukasi menjadi bagian penting dalam upaya pengawasan yang dilakukan oleh Bakesbangpol.

Evaluasi kinerja Bakesbangpol dalam pengawasan organisasi kemasyarakatan juga perlu dilakukan secara berkala. Dengan adanya evaluasi, akan terlihat sejauh mana efektivitas pengawasan yang dilakukan dan apakah ada aspek-aspek yang perlu diperbaiki. Hal ini penting untuk memastikan bahwa pengawasan yang dilakukan tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga proaktif dalam mencegah masalah sebelum terjadi.

Organisasi kemasyarakatan (Ormas) memiliki peran signifikan dalam mendukung pembangunan dan menjaga harmoni sosial di tengah masyarakat. Sebagai wadah aspirasi dan partisipasi publik, Ormas dapat berkontribusi pada berbagai bidang, termasuk pendidikan, sosial, budaya, dan kemanusiaan. Namun, dinamika yang terjadi dalam pengelolaan Ormas memerlukan perhatian, terutama dalam aspek pengawasan (Hakim, M. N). Di Kota Surabaya, pengawasan terhadap Ormas menjadi tantangan tersendiri karena belum adanya peraturan wali kota (Perwali) atau peraturan daerah (Perda) khusus yang mengatur Ormas, mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam dan Pemerintah Daerah. Saat ini, regulasi terkait Ormas masih mengacu pada kebijakan di tingkat pusat, seperti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan pada tanggal 10 Juli 2017 menjadi UU Nomor 16 Tahun 2017 (Tarihoran, I. (2022)). Untuk itu, pemerintah kota Surabaya perlu menerapkan strategi pengawasan yang efektif meskipun tanpa regulasi lokal yang spesifik. Salah satu langkah strategis yang telah diambil oleh Bakesbangpol Kota Surabaya adalah mengadakan dialog interaktif bersama Ormas. Kegiatan ini bertujuan untuk membangun

komunikasi dua arah antara Bakesbangpol Kota Surabaya dan Ormas, sehingga tercipta pemahaman yang sama terkait peran, tanggung jawab, dan batasan dalam aktivitas Ormas. Selain dialog interaktif, pemerintah kota juga menyelenggarakan rapat tim terpadu (timdu) untuk pengawasan Ormas.

Timdu ini beranggotakan berbagai elemen pemerintah, termasuk dinas-dinas terkait, aparat keamanan, dan lembaga hukum. Fungsi utama timdu adalah mengoordinasikan pengawasan secara menyeluruh dan menyusun langkah-langkah preventif untuk mengatasi potensi permasalahan yang timbul akibat aktivitas Ormas (Rofiq, A. (2023)). Kegiatan Timdu menjadi bukti keseriusan pemerintah kota dalam menjaga ketertiban dan mencegah penyalahgunaan peran Ormas di masyarakat. Namun, upaya pengawasan ini menghadapi beberapa tantangan. Salah satunya adalah keterbatasan data dan informasi yang terintegrasi mengenai Ormas yang aktif di Surabaya. Tanpa regulasi lokal yang spesifik, proses registrasi dan monitoring Ormas lebih sulit dilakukan secara sistematis. Keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran untuk pengawasan menjadi kendala tambahan yang perlu diatasi. Oleh karena itu, penguatan sinergi antara pemerintah daerah dan pusat sangat diperlukan untuk menciptakan mekanisme pengawasan yang lebih efisien dan efektif (Sunarso, H. S., & SH, M. (2023)).

Pengawasan Ormas di Kota Surabaya memiliki peran strategis dalam menciptakan lingkungan sosial yang kondusif dan harmonis. Upaya yang dilakukan melalui dialog interaktif dan rapat timdu telah memberikan dasar yang kuat untuk membangun pengawasan yang partisipatif dan adaptif (Karim, N . & dkk,2024). Namun, masih banyak ruang untuk pengembangan, terutama dalam memanfaatkan teknologi dan menyusun regulasi lokal yang lebih terintegrasi. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan pengawasan Ormas di Surabaya dapat menjadi model yang efektif dan inspiratif bagi kota-kota lain di Indonesia. Konteks pengelolaan organisasi kemasyarakatan, Kota Surabaya tidak hanya menghadapi tantangan administratif, tetapi juga harus merespons dinamika sosial yang kompleks. Sebagai kota metropolitan dengan jumlah penduduk yang besar dan beragam, Surabaya menjadi tempat berkembangnya berbagai Ormas dengan latar belakang, visi, dan misi yang beragam pula. Keberadaan Ormas di Surabaya sering kali menjadi penggerak kegiatan sosial dan budaya, namun tidak dapat dipungkiri bahwa sebagian Ormas juga dapat memicu potensi permasalahan jika tidak diawasi dengan baik. Oleh karena itu, pengawasan terhadap Ormas tidak hanya menjadi tanggung jawab administratif, tetapi juga bagian dari upaya menjaga stabilitas sosial, keamanan, dan ketertiban umum ((Rembet, M. S. (2020)). Salah satu isu krusial dalam pengawasan Ormas

di Surabaya adalah ketiadaan Perwali atau Perda khusus yang mengatur secara rinci mekanisme dan kewajiban Ormas di tingkat lokal. Ketergantungan pada regulasi pusat memberikan dasar hukum, tetapi tidak selalu mampu menjawab kebutuhan spesifik kota ini. Pada praktiknya, pendekatan lokal yang lebih adaptif sering kali diperlukan untuk menghadapi isu-isu yang muncul, seperti aktivitas Ormas yang tidak sesuai dengan visi pembangunan daerah atau bahkan yang berpotensi memicu disintegrasi sosial. Hal ini menuntut pemerintah kota untuk tidak hanya bersandar pada kebijakan pusat, tetapi juga mengembangkan strategi pengawasan yang sesuai dengan karakteristik local (Pertiwi, S. F., & Herawati, N. R. (2023)).

Dialog interaktif yang diadakan bersama Ormas menjadi salah satu langkah konkret untuk menjawab tantangan ini ((Rembet, M. S. (2020)). Pada dialog tersebut, pemerintah dapat menjelaskan berbagai regulasi yang berlaku, memberikan pembinaan kepada Ormas, sekaligus mendengar masukan langsung dari mereka. Dialog ini juga menjadi ruang untuk membangun relasi yang lebih baik antara pemerintah dan Ormas, sehingga mendorong terciptanya transparansi dan saling pengertian. Selain itu, dialog interaktif ini membantu Ormas memahami pentingnya peran mereka dalam mendukung pembangunan kota, sekaligus memberikan ruang bagi mereka untuk menyampaikan aspirasi secara konstruktif ((Karim, N & dkk. (2024)). Rapat tim terpadu (timdu) yang melibatkan berbagai elemen pemerintahan juga menjadi bagian penting dalam strategi pengawasan. Timdu berfungsi untuk mengoordinasikan informasi, memonitor aktivitas Ormas, dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam menangani permasalahan yang muncul. Misalnya, jika terdapat indikasi pelanggaran hukum oleh suatu Ormas, timdu dapat bertindak cepat dengan melibatkan pihak keamanan dan lembaga hukum. Timdu tidak hanya berfungsi sebagai pengawas, tetapi juga sebagai fasilitator yang memastikan Ormas tetap berada dalam koridor hukum dan etika yang berlaku (Pratama, K. J. (2021)). Selain pengawasan langsung, pemerintah kota juga perlu mempertimbangkan aspek pencegahan melalui edukasi dan pemberdayaan. Banyak Ormas yang sebenarnya memiliki niat baik, namun kurang memahami aturan dan batasan yang harus mereka patuhi. Dengan memberikan pelatihan atau sosialisasi secara berkala, pemerintah dapat membantu Ormas meningkatkan kapasitas mereka, baik dalam hal administrasi, manajemen, maupun pengelolaan kegiatan yang bertanggung jawab. Langkah ini tidak hanya mencegah terjadinya pelanggaran, tetapi juga memperkuat peran Ormas sebagai mitra strategis pemerintah dalam membangun masyarakat yang sejahtera dan harmonis (Rahman, A & dkk (2023)).

Tantangan lain yang perlu diatasi adalah bagaimana mengintegrasikan teknologi dalam pengawasan Ormas. Kota Surabaya yang dikenal sebagai salah satu kota dengan tingkat digitalisasi tinggi, memiliki peluang besar untuk memanfaatkan teknologi dalam mendukung pengawasan Ormas (Karamoy, D. N. (2020)). Sebagai contoh, sistem pendataan berbasis digital dapat digunakan untuk merekam informasi tentang Ormas, termasuk kepengurusan, sumber pendanaan, dan aktivitas yang mereka lakukan. Data ini tidak hanya mempermudah proses monitoring, tetapi juga membantu pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang lebih berbasis data (data-driven policy). Sistem ini juga dapat memfasilitasi masyarakat untuk melaporkan kegiatan Ormas yang dianggap tidak sesuai, sehingga pengawasan dapat dilakukan secara kolaboratif. Lebih lanjut, pengawasan terhadap Ormas juga harus mempertimbangkan dimensi hak asasi manusia dan kebebasan berserikat yang dijamin oleh undang-undang. Pemerintah kota harus berhati-hati agar pengawasan yang dilakukan tidak disalahartikan sebagai upaya membatasi kebebasan Ormas untuk berorganisasi dan berekspresi. Hal ini, pendekatan yang transparan, inklusif, dan berbasis dialog menjadi kunci untuk menjaga keseimbangan antara pengawasan dan penghormatan terhadap hak-hak dasar. Pengawasan Ormas di Kota Surabaya merupakan tanggung jawab yang kompleks dan multidimensional. Meskipun belum memiliki regulasi lokal yang spesifik, pemerintah kota telah menunjukkan komitmen melalui berbagai inisiatif seperti dialog interaktif dan rapat timdu. Namun, upaya ini perlu terus diperkuat dengan pendekatan yang lebih inovatif, partisipatif, dan berbasis teknologi.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Pengumpulan data didapatkan dari wawancara dan laporan kegiatan berbagai ormas. Laporan ini berisi informasi mengenai program yang telah dilaksanakan, jumlah peserta, serta hasil yang dicapai. Penulis menghubungi pengurus ormas melalui email dan telepon untuk meminta salinan laporan tersebut. Penulis juga melakukan wawancara dengan pengurus ormas. Penulis juga menggunakan metode survei untuk mengumpulkan data dari peserta program. Penulis menyusun kuesioner yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang relevan dengan kegiatan ormas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di Kota Surabaya

Pengawasan organisasi kemasyarakatan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di Kota Surabaya merupakan salah satu upaya strategis untuk memastikan keberlangsungan fungsi Ormas sesuai dengan prinsip demokrasi, hukum, dan nilai-nilai kebangsaan. Untuk memahami pelaksanaan pengawasan tersebut, teori pengawasan yang dikemukakan oleh Sudrajat (2010) dapat menjadi kerangka utama. Menurut teori ini, pengawasan adalah proses sistematis untuk memantau pelaksanaan kegiatan, membandingkan hasil dengan standar yang telah ditetapkan, serta mengambil langkah korektif jika terdapat penyimpangan. Pada kerangka teori pengawasan Sudrajat, terdapat beberapa elemen penting yang relevan dengan pengawasan Ormas.

Perencanaan Pengawasan

Satu aspek penting dalam perencanaan ini adalah penyusunan jadwal kunjungan. Penulis merencanakan kunjungan ke berbagai ormas di Kota Surabaya untuk melihat secara langsung pelaksanaan program. Dalam menyusun jadwal, penulis mempertimbangkan berbagai faktor, seperti lokasi ormas, jenis program yang mereka jalankan, dan waktu pelaksanaan kegiatan.

Selama tahap perencanaan ini, penulis mengadakan rapat dengan tim terpadu di Bakesbangpol untuk membahas rencana pengawasan yang telah disusun. Penulis merasa bahwa kolaborasi tim sangat penting dalam merancang pengawasan yang efektif. Terdapat perbaikan rencana pengawasan setelah melibatkan beberapa proses penyesuaian agar lebih komprehensif dan sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Hal ini juga membuat penulis merasa lebih percaya diri bahwa rencana yang akan dilaksanakan dapat berjalan dengan baik.

Pengumpulan Data

Proses ini sangat krusial karena data yang dikumpulkan akan menjadi dasar bagi penilaian ormas yang diawasi. Penulis memahami bahwa untuk mendapatkan gambaran yang akurat tentang pelaksanaan program, diperlukan informasi yang komprehensif. Oleh karena itu, penulis mulai merancang strategi pengumpulan data yang melibatkan berbagai metode.

Di Bakesbangpol Kota Surabaya, penulis mengawali kegiatan ini dengan mengumpulkan laporan kegiatan dari berbagai ormas. Laporan ini berisi informasi mengenai program yang telah dilaksanakan, jumlah peserta, serta hasil yang dicapai. Penulis menghubungi pengurus ormas melalui email dan telepon untuk meminta salinan laporan tersebut. Dalam proses ini, penulis berusaha menjalin komunikasi yang baik agar pengurus merasa nyaman dalam berbagi informasi.

Selain mengumpulkan laporan, penulis juga melakukan wawancara dengan pengurus ormas. Wawancara ini bertujuan untuk mendalami informasi yang terdapat dalam laporan dan mendapatkan perspektif langsung dari mereka yang terlibat dalam pelaksanaan program. Penulis mengatur waktu wawancara dengan pengurus ormas pada saat mereka memiliki waktu luang, sehingga mereka dapat berbagi pengalaman tanpa terburu-buru. Dalam wawancara ini, penulis mengajukan pertanyaan terbuka agar pengurus dapat menjelaskan secara rinci tentang tantangan dan keberhasilan yang mereka alami. Selama wawancara, penulis mencatat dengan seksama setiap informasi yang diberikan. Penulis berusaha untuk menggali lebih dalam mengenai dampak dari program yang telah dilaksanakan, baik dari sisi positif maupun negatif. Dengan mendengarkan pengalaman langsung dari pengurus, penulis dapat memahami konteks yang lebih luas dan nuansa yang mungkin tidak tertera dalam laporan tertulis. Hal ini sangat membantu penulis dalam menyusun analisis yang lebih komprehensif. Selain wawancara, penulis juga menggunakan metode survei untuk mengumpulkan data dari peserta program. Penulis menyusun kuesioner yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang relevan dengan kegiatan ormas. Kuesioner ini dirancang untuk mengukur kepuasan peserta, dampak program terhadap kehidupan mereka, dan harapan mereka untuk program di masa depan. Penulis kemudian mengedarkan kuesioner ini secara langsung kepada peserta saat kegiatan berlangsung, sehingga mereka dapat memberikan tanggapan dengan mudah.

Setelah kuesioner diisi, penulis mengumpulkan dan menganalisis data yang diperoleh. Penulis menggunakan perangkat lunak statistik sederhana untuk mengolah data, sehingga dapat menghasilkan grafik dan tabel yang menggambarkan hasil survei. Dengan cara ini, penulis bisa mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang bagaimana program tersebut diterima oleh masyarakat dan dampaknya terhadap mereka. Penulis juga menyadari pentingnya triangulasi data dalam pengumpulan informasi. Untuk itu, penulis berusaha mengonfirmasi data yang diperoleh dari laporan, wawancara, dan survei dengan melakukan observasi langsung di lapangan. Penulis mengunjungi lokasi kegiatan

ormas untuk melihat sendiri bagaimana program dijalankan. Observasi ini membantu penulis untuk menilai kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan yang sebenarnya.

Analisis Data

Penulis menemukan bahwa beberapa program berjalan dengan baik dan berhasil menarik partisipasi tinggi dari masyarakat. Namun, ada juga program yang menunjukkan hasil yang kurang memuaskan, misalnya, rendahnya tingkat partisipasi atau dampak yang tidak terasa di masyarakat. Temuan ini menjadi bahan diskusi penting dalam memberikan rekomendasi kepada ormas.

Penulis juga melakukan analisis mendalam terhadap data survei yang diperoleh dari peserta. Penulis menemukan bahwa mayoritas peserta merasa puas dengan program yang mereka ikuti, tetapi ada beberapa aspek yang perlu diperbaiki, seperti durasi pelatihan dan materi yang disampaikan. Data ini sangat berharga untuk memberikan umpan balik yang konkret dan terukur kepada pengurus ormas.

Setelah semua analisis selesai, penulis menyusun laporan yang merangkum hasil evaluasi kinerja ormas. Laporan ini mencakup temuan-temuan utama, rekomendasi untuk perbaikan, dan langkah-langkah yang dapat diambil oleh ormas untuk meningkatkan program mereka ke depan.

Pemberian Umpan Balik

Penulis menyusun laporan yang merangkum hasil evaluasi kinerja ormas, termasuk temuan-temuan positif dan area yang membutuhkan perbaikan. Pada laporan tersebut, penulis mencatat bahwa beberapa program pelatihan keterampilan berhasil menarik banyak peserta dan memberikan dampak positif pada peningkatan keterampilan masyarakat. Penulis mengapresiasi usaha pengurus ormas yang telah bekerja keras dalam merancang program-program tersebut. Dengan memberikan pengakuan atas keberhasilan ini, penulis berharap dapat memotivasi pengurus ormas untuk terus berinovasi dan meningkatkan kualitas program mereka.

Penulis juga tidak mengabaikan area yang perlu perbaikan. Dalam laporan, penulis menjelaskan dengan rinci mengenai program-program yang menunjukkan hasil kurang memuaskan seperti pelatihan yang berlangsung terlalu singkat dan tidak memberikan waktu yang cukup bagi peserta untuk memahami materi secara mendalam.

Setelah laporan selesai disusun, penulis mengadakan pertemuan dengan pengurus ormas untuk menyampaikan umpan balik dan mendiskusikannya secara langsung. Dalam pertemuan ini, penulis menjelaskan hasil analisis dan rekomendasi secara rinci. Penulis

juga membuka ruang bagi pengurus ormas untuk memberikan tanggapan dan menjelaskan pandangan mereka terkait umpan balik yang diberikan. Dengan cara ini, penulis berharap dapat membangun hubungan yang baik dan saling percaya antara Bakesbangpol dan ormas, serta mendorong kolaborasi yang lebih baik di masa depan.

Monitoring Berkelanjutan

Tahap ini sangat penting karena memungkinkan penulis untuk melihat secara langsung bagaimana kegiatan ormas dilaksanakan dan memberikan dukungan yang diperlukan. Penulis mengatur jadwal kunjungan rutin ke lokasi-lokasi kegiatan yang diadakan oleh ormas, sehingga dapat mengevaluasi perkembangan program secara langsung.

Setiap kunjungan, penulis berusaha untuk terlibat aktif dalam kegiatan yang berlangsung. Penulis mengamati bagaimana pengajaran dilakukan, serta bagaimana peserta berpartisipasi dalam setiap sesi. Dengan cara ini, penulis bisa mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai efektivitas program dan tanggapan peserta. Kunjungan rutin ini juga memberi kesempatan bagi penulis untuk memberikan dukungan langsung kepada ormas.

Melalui monitoring berkelanjutan, penulis juga dapat mencatat perkembangan yang positif dan memberikan pengakuan kepada ormas atas usaha mereka. Penulis menyadari bahwa memberikan apresiasi kepada pengurus dan peserta sangat penting untuk memotivasi mereka agar terus berkomitmen dalam menjalankan program. Dengan mengakui keberhasilan mereka, penulis berharap dapat mendorong ormas untuk terus berinovasi dan meningkatkan kualitas kegiatan yang mereka tawarkan.

Evaluasi Program

Evaluasi ini sangat penting untuk menilai sejauh mana program yang dijalankan oleh ormas dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam konteks Bakesbangpol Kota Surabaya, penulis mengambil langkah-langkah sistematis untuk menggali lebih dalam mengenai hasil yang dicapai oleh ormas serta dampaknya terhadap masyarakat.

Setelah mengumpulkan data yang diperlukan, penulis menganalisis informasi tersebut untuk menilai efektivitas program. Penulis membandingkan hasil yang diperoleh dengan tujuan awal yang telah ditetapkan. Penulis juga melihat apakah ada peningkatan dalam penghasilan peserta setelah mereka menyelesaikan program tersebut. Dengan cara

ini, penulis dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai dampak program terhadap kehidupan masyarakat.

Selama evaluasi, penulis mencatat temuan penting yang akan digunakan untuk memberikan rekomendasi. Jika penulis menemukan bahwa suatu program berhasil tetapi hanya menjangkau sedikit orang, penulis menyarankan agar ormas memperluas jangkauan program agar bisa melibatkan lebih banyak masyarakat. Selain itu, penulis juga memberikan saran untuk meningkatkan cara mengajar atau menyampaikan materi agar lebih menarik dan mudah dipahami oleh peserta.

SIMPULAN

Pengawasan organisasi kemasyarakatan (ormas) oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) di Kota Surabaya merupakan langkah strategis dalam memastikan keberlanjutan peran ormas sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan. Fungsi pengawasan ini tidak hanya mencakup kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi juga mencakup pembinaan untuk meningkatkan kapasitas ormas agar dapat berkontribusi positif bagi masyarakat. Dengan adanya pengawasan yang sistematis, Bakesbangpol dapat memastikan bahwa ormas menjalankan visi dan misi mereka sesuai dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta menjaga keharmonisan sosial di tengah keragaman budaya dan agama di Surabaya. Proses pengawasan dilakukan melalui berbagai mekanisme, termasuk verifikasi dokumen, survei lapangan, dan koordinasi langsung dengan pengurus ormas. Verifikasi dokumen melibatkan pemeriksaan administrasi, seperti akta pendirian, laporan kegiatan, dan laporan keuangan yang diajukan oleh ormas. Hal ini bertujuan untuk memastikan legalitas dan keberlanjutan operasional ormas. Selain itu, survei lapangan dilakukan untuk memahami kondisi nyata di lingkungan kerja ormas, mengevaluasi dampak kegiatan mereka terhadap masyarakat, serta mengidentifikasi tantangan yang dihadapi. Hasil survei ini menjadi acuan bagi Bakesbangpol untuk merumuskan kebijakan pembinaan yang lebih efektif. Kegiatan pembinaan juga menjadi bagian integral dari pengawasan ormas. Bakesbangpol tidak hanya berperan sebagai pengawas, tetapi juga sebagai fasilitator dan pendukung dalam pengembangan kapasitas ormas.

Program pelatihan, seperti pengelolaan organisasi, manajemen keuangan, dan penguatan nilai-nilai kebangsaan, sering kali diadakan untuk meningkatkan kompetensi pengurus ormas. Langkah ini penting untuk memastikan bahwa ormas tidak hanya

mematuhi aturan, tetapi juga mampu memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat luas. Bakesbangpol juga memfasilitasi dialog dan mediasi antara ormas dengan pemerintah maupun antarormas untuk menjaga hubungan yang harmonis dan mengatasi potensi konflik yang mungkin terjadi. Pengawasan ormas di Surabaya juga menitikberatkan pada peran ormas dalam menjaga kerukunan dan toleransi di tengah masyarakat yang beragam. Ormas keagamaan, sosial, dan budaya diajak untuk bersama-sama mempromosikan nilai-nilai kebersamaan dan menghormati perbedaan. Bakesbangpol memastikan bahwa kegiatan ormas tidak bertentangan dengan semangat Pancasila dan UUD 1945 sebagai dasar negara. Ormas yang terbukti melakukan aktivitas yang berpotensi memecah belah masyarakat atau melanggar hukum akan diberikan peringatan, dan jika perlu, dilakukan tindakan tegas sesuai aturan yang berlaku. Pengawasan ormas oleh Bakesbangpol di Kota Surabaya mencerminkan upaya pemerintah dalam menciptakan tata kelola ormas yang lebih baik dan berdaya guna. Proses pengawasan yang dilakukan dengan pendekatan yang transparan dan partisipatif memungkinkan terwujudnya sinergi antara pemerintah dan ormas. Dengan demikian, ormas dapat menjalankan perannya secara optimal sebagai mitra strategis pemerintah dalam pembangunan, khususnya dalam menciptakan masyarakat yang damai, sejahtera, dan berkeadilan. Upaya pengawasan ini juga menjadi wujud nyata komitmen Bakesbangpol dalam menjaga stabilitas sosial, meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, serta memperkuat nilai-nilai kebangsaan di Kota Surabaya. Dengan keberlanjutan pengawasan yang efektif, ormas diharapkan dapat terus berkembang menjadi entitas yang profesional, bertanggung jawab, dan mampu berkontribusi positif bagi kemajuan masyarakat serta pembangunan kota secara keseluruhan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amin Priatna, Disertasi "Analisis Implementasi Kebijakan Kesejahteraan Dosen pada Universitas Pendidikan Indonesia || , Paka Sarjana UNJ, tahun 2008, h.15,
- Amin Priatna, Disertasi "Analisis Implementasi Kebijakan Kesejahteraan Dosen pada Universitas Pendidikan Indonesia || , Paka Sarjana UNJ, tahun 2008, h.15,
- Apriani, T., & Wibowo, C. (2018). Pengawasan Ormas Asing dalam Menjaga Ketahanan Nasional di Nusa Tenggara Barat. *Matra Pembaruan: Jurnal Inovasi Kebijakan*, 2(2), 85-95.
- Aziz, M. S., Sucipto, H., & Riono, S. B. (2022). Pemberdayaan Organisasi Masyarakat melalui Pembentukan Event Organizer Bazar Kuliner (Studi pada Organisasi

- Masyarakat Desa Ciawi, Brebes). *SAFARI: Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia*, 2(4), 15-22.
- Dewi, L. K., Kusumastuti, H., & Waskita, B. (2024). Pembinaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan oleh Badan Kesbangpol di Provinsi Lampung. *Jurnal STIA Bengkulu: Committe to Administration for Education Quality*, 10(1), 97-106.
- Eriyanti, L. D. Ormas Islam Perempuan Dan Human Security: Analisis Gerakan Dan Strategi Dalam Mereduksi Ancaman Human Security Perempuan Di Jember.
- Eviany, E., & Sutiyo, S. S. T. P. (2023). *PERLINDUNGAN MASYARAKAT: Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum, Dan Manajemen Kebencanaan*. Nas Media Pustaka.
- Fatimah, A. S. (2017). Pengaruh Pengawasan Langsung dan Tidak Langsung Terhadap Kinerja Pegawai Di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tasikmalaya. *Jurnal Studi Sosial dan Politik*, 1(2), 167-178.
- Hakim, M. N. Organisasi Masyarakat Dan Radikalisme Peran Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Bogor Dalam Mencegah Paham Radikalisme Di Kalangan Pemuda Kabupaten Bogor, Jawa Barat (Bachelor's thesis, Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Haroid Koontz, Cyril O'Donell, and Heinz Wehrich, *Management Eighth Edition* (New York: McGraw-Hill Book Company, 1992), p. 144
- Hartini, E. (2017). Pelaksanaan pengawasan fungsional dalam rangka optimalisasi kerja di inspektorat daerah kabupaten Kutai Barat. *Jurnal Administrative Reform*, 1(1), 40-60.
- Heinz Wehrich and Haroid Koontz, *Management A. Global Perspective Tenth Edition*
- Karamoy, D. N. (2020). Pengawasan Terhadap Organisasi Kemasyarakatan yang Didirikan Oleh Warga Negara Asing. *Lex Et Societatis*, 8(3).
- Karim, N., Rohayati, W., & Pratiwi, C. S. (2024). Kebijakan Kuota Produksi dan Transportasi Batu Bara di Provinsi Jambi Ditinjau Dari Aspek Pelayanan Masyarakat. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 1(6).
- Kusdi. 2009. *Teori Organisasi dan Administrasi*. Salemba Humanika: Jakarta
- Mahardika, F., & Kebudayaan, K. (2012). *Lembaga Swadaya Masyarakat (Lsm) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 Tentang Organisasi Kemasyarakatan*. Skripsi. Purwokerto: Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman.

- Meriza, I. (2018). Pengawasan (Controlling) Dalam Institusi Pendidikan. *At-Ta'dib: Jurnal Ilmiah Prodi Pendidikan Agama Islam*, 37-46.
- Nichayah, M. (2022). Pengawasan Apbd Oleh Dprd Berdasarkan Peraturan Walikota Malang Nomor 60 Tahun 2019 Ditinjau Dari Konsep Syuro Dalam Fiqh Siyarah (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).
- Noeng Muhadjir, Ilmu pendidikan dan Perubahan Sosial. *Teori Pendidikan Pelaku Sosial Kreatif*. Yogyakarta : Raka Sarasin, th.2000, h. 15.
- Pertiwi, S. F., & Herawati, N. R. (2023). Pengawasan Kepada Organisasi Kemasyarakatan Oleh Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Semarang Tahun 2022 (Sesuai Permendagri Nomor 56 Tahun 2017). *Journal Of Politic And Government Studies*, 12(4), 210-226.
- Pertiwi, S. F., & Herawati, N. R. (2023). Pengawasan Kepada Organisasi Kemasyarakatan Oleh Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Semarang Tahun 2022 (Sesuai Permendagri Nomor 56 Tahun 2017). *Journal Of Politic And Government Studies*, 12(4), 210-226.
- Pratama, D. (2014). Pengaruh Penganggaran Berbasis Kinerja, Pengawasan Preventif dan Pengawasan Detektif Terhadap Efektifitas Pengendalian Anggaran (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Pelalawan) (Doctoral dissertation, Riau University).
- Pratama, K. J. (2021). Mengoptimalkan Mekanisme Pengawasan Dalam Jaringan Terhadap Organisasi Kemasyarakatan Berbadan Hukum Perkumpulan di Indonesia. *Majalah Hukum Nasional*, 51(2), 239-260.
- Purba, J. R. (2022). Laporan Pengkajian Hukum Tentang Peran Dan Tanggungjawab Organisasi Kemasyarakatan Dalam Pemberdayaan Masyarakat.
- Putra, K. (2021). Rekonstruksi Pelaksanaan Sistem Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Yang Berbasis Nilai Keadilan (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia)).
- Rahman, A., Wasistiono, S., Riyani, O., & Tahir, I. (2023). Peran Organisasi Masyarakat (Ormas) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 7(2), 1461-1471.
- Rahman, A., Wasistiono, S., Riyani, O., & Tahir, I. (2023). Peran Organisasi Masyarakat (Ormas) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 7(2),

1461-1471.

- Rembet, M. S. (2020). Larangan Bagi Organisasi Kemasyarakatan Dan Pemberlakuan Sanksi Administratif. *LEX ADMINISTRATUM*, 8(4).
- Rofiq, A. (2023). Komunikasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Sebagai Perwujudan Moderasi Beragama di Kabupaten Banyuwangi. *Al-Tsiqoh: Jurnal Ekonomi dan Dakwah Islam*, 8(2), 50-78.
- Saleh, M., Khair, A., Kafrawi, K., & Sarkawi, S. (2022). Peran Pemda Dalam Pengawasan Ormas di Daerah (Studi di Kabupaten Sumbawa Barat). *Jurnal Diskresi*, 1(2).
- Siagian, S. P. (2005). Fungsi-fungsi manajerial.
- Simamora, N. B. A., & Ridwan, R. (2024). Politik Pembangunan Koeksistensi di Kota Depok: Refleksi Kasus Demonstrasi terhadap Kapel Gereja Bethel Indonesia (GBI) Cinere oleh Organisasi Masyarakat. *Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 7(2), 283-295.
- Sinaga, F. (2018). Peran Dan Fungsi Organisasi Masyarakat Dalam Melakukan Kegiatan Politik Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Masyarakat.
- Stephen P. Robbins. 1994. *Teori Organisasi. Struktur, Desain & Aplikasi*. Arcan: Jakarta
- Sudrajat, A. S. (2010). Konsep dan Mekanisme Pengawasan terhadap Peraturan daerah dihubungkan dengan hakikat otonomi daerah. *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi*, 7(3), 01-01.
- Sunarso, H. S., & SH, M. (2023). *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Sururama, R., & Amalia, R. (2020). Pengawasan pemerintahan.
- Tami, N. A., Hanani, R., & Kismartini, K. (2024). Implementasi Kebijakan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Oleh Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Semarang. *Nova Idea*, 1(3), 98-112.
- Tarihoran, I. (2022). Politik Hukum Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan Dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013.
- Uhai, S. (2021). Peranan Organisasi Masyarakat Sadar Wisata (Masata) Untuk Pengembangan Desa Wisata di Kalimantan Timur. *Sebatik*, 25(2), 614-623.
- Wijayanthi, I. G. A. A. T. (2020). *Penegakan Hukum Terhadap Pungutan Liar Yang Dilakukan Oleh Oknum Organisasi Masyarakat Di Wilayah Hukum Polres Buleleng (Doctoral dissertation, Universitas Pendidikan Ganesha)*.